Bali Post

Dikhawatirkan Jadi "Ladang" Korupsi

Anggaran Pendidikan Harus Dipantau Khusus

Denpasar (Bali Post) –

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang cukup tinggi untuk pembangunan sektor kependidikan di Bali. Namun, anggaran yang mengucur deras ke sektor pendidikan itu sangat potensial dijadikan "ladang" korupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab jika tidak disertai dengan pengawasan yang ekstra ketat. Meminimalisasi terjadinya penyimpangan di lapangan, pemerintah daerah diminta membentuk sejenis tim khusus guna memantau distribusi maupun realisasi anggaran pendidikan tersebut.

Pengamat pendidikan Drs. I Made Gede Putra Wijaya, S.H., M.Si. dan Drs. I Putu Sarjana, M.Si. mengatakan hal itu kepada *Bali Post*, Jumat (23/10) kemarin. Menurut Putra Wijaya, anggaran pendidikan yang nilai nominalnya relatif tinggi sangat rawan dikorupsi. Namun, kekhawatiran itu tidak boleh dijadikan dalih pembenar untuk tidak merealisasikan anggaran pendidikan 20 persen yang sudah jadi amanat undang-undang. Mengantisipasi terjadinya korupsi di sektor pendidikan, tentu saja fungsi pengawasan dan pemantauan itu yang wajib dilakukan secara sungguh-sungguh. "Menurut saya, keberadaan tim khusus untuk memantau anggaran pendidikan itu bersifat mutlak. Namun, tim itu tidak boleh sekadar papan nama alias tidak benar-benar serius melakukan pemantauan ke lapangan," kata Putra Wijaya.

Hal senada juga dilontarkan Sarjana. Namun, dosen Universitas Hindu Indonesia ini mengingatkan bahwa esensi pembentukan tim khusus itu bukan sengaja untuk mencari-cari kesalahan pihak sekolah maupun pihak-pihak penerima anggaran pendidikan itu. Tetapi, murni memerankan diri sebagai alat kontrol maupun mengantisipasi terjadinya pelanggaran. Bahkan, tim itu juga wajib memberikan bimbingan secara terstruktur dan tersistematisasi agar pihak penerima anggaran pendidikan mampu mengelola anggaran itu secara benar alias tidak menyalahi ketentuan yang dipersyaratkan.

"Jadi, fungsinya justru lebih dititikberatkan pada fungsi preventif. Yakni, mencegah terjadinya penyimpangan dalam pemanfaatan maupun pengelolaan anggaran pendidikan," tegasnya.

Menurut Sarjana, tim khusus itu sebaiknya tidak hanya diperkuat oleh instansi terkait di lingkungan pemerintah daerah seperti Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dan Inspektorat. Namun, juga wajib menyertakan instansi terkait lainnya seperti Kejaksaan, Dewan Pendidikan di masing-masing kabupaten/kota dan aparat penegak hukum lainnya.

"Mereka yang terlibat dalam tim khusus inilah yang secara proaktif melakukan pengawasan guna meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan anggaran pendidikan serendah mungkin. Ingat, esensi pembentukan tim khusus ini murni memerankan diri sebagai alat kontrol maupun mengantisipasi terjadinya pelanggaran. Bukan sengaja mencari-cari kesalahan," kata Sarjana mengingatkan. **(kmb13)**

Edisi : Sabtu, 24 Oktober 2015
Hal : 3

Bali Post

Kasus Korupsi Bantuan Sapi

Divonis Minimal, Yanti Malah Nyatakan Banding

Denpasar (Bali Post) -

Vonis hukuman paling minimal untuk perkara korupsi yang diberikan hakim Tipikor, rupanya belum memuaskan terdakwa Ni Made Sumerta Yanti. Walau sudah dihukum paling singkat yakni setahun penjara, satu-satunya terdakwa wanita dalam kasus bantuan pengembangan sapi betina fiktif ini justru menyatakan banding. Terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya Ketut Bakuh, merasa tidak bersalah dan tidak pernah menerima uang hasil korupsi. Karenanya, Yanti menyatakan banding.

Banding ini sudah dinyatakan, Minggu lalu, setelah ia dinyatakan bersalah dan divonis satu tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Denpasar pada Selasa (29/9) lalu. Sementara dua terpidana lainnya yang divonis lebih berat, yaitu Ketua Kelompok Sapi Pucung Sari Mangku Laba (divonis 3 tahun) dan anggota kelompok Juliasa (divonis 1 tahun 4 bulan) menyatakan menerima putusan.

Ketut Bakuh yang dimintai konfirmasi, Jumat (23/10) kemarin, menyatakan memang benar kliennya menyatakan banding atas putusan minimal itu. "Ya, dipastikan banding. Yanti yang langsung menyatakan banding," katanya, kemarin.

Atas kondisi itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem juga menyatakan banding dan sudah mengirimkan pemberitahuan banding ke keluarga Yanti. "Yanti dan jaksa sama-sama banding. Tetapi, saya tidak tahu prosesnya sekarang sampai di mana, karena Yanti tidak lagi melalui kami menyatakan bandingnya. Kalau Mangku Laba dan Juliasa sudah menerima putusan," katanya.

Sebelumnya, tiga terdakwa kasus korupsi kelompok sapi betina fiktif ini divonis berbeda. Ketua Kelompok Sapi Pucung Sari, Mangku Laba, divonis 3 tahun ditambah denda Rp 50 juta subsider tiga bulan dan mengganti kerugian negara Rp 443 juta, dengan ketentuan jika tidak mampu membayar diganti pidana penjara satu tahun enam bulan. Sementara anggota kelompok, Juliasa, divonis 1 tahun 4 bulan (16 bulan) ditambah denda Rp 50 juta subsider dua bulan penjara tanpa mengganti kerugian negara karena sudah mengembalikan uang hasil korupsi Rp 50 juta. Yanti sendiri divonis 1 tahun penjara ditambah denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara dan tidak dikenai pengembalian kerugian negara karena sudah menitipkan uang Rp 7 juta di kejaksaan. **(kmb37)**

Edisi : Sabtu, 24 Oktober 2015
Hal : 2

Bali Post

Langgar Batas Waktu Pemasangan

Satpol PP Semprit Tiga Pemilik Reklame

Denpasar (Bali Post) -

Satpol PP Denpasar terus melakukan pemantauan terhadap pelanggaran reklame. Terutama reklame yang telah habis masa izin pemasangannya. Jumat (23/10) kemarin, Satpol PP Kota Denpasar melakukan pemantauan dan menyemprit pemilik reklame ukuran besar yang terdapat di tiga titik yang melanggar batas waktu.

Satpol PP melakukan pemantauan dari kawasan Jalan Surapati, Jalan Waribang Kesiman, dan Jalan By-pass Ngurah Rai, Sanur. Dari tiga titik di kawasan tersebut, ditemukan reklame yang melanggar karena sudah kedaluwarsa. Bahkan, pemiliknya sudah berencana untuk menurunkannya. "Dari tiga titik yang telah kami berikan surat peringatan kepada pemilik, dua reklame telah siap dibongkar pemiliknya, yakni di Jl. Surapati dan Jl. By-pass Ngurah Rai, Sanur," ujar Kasatpol PP Kota Denpasar I.B. Alit Wiradana.

Lebih lanjut Alit Wiradana menjelaskan, langkah penertiban ini telah dilakukan sesuai prosedur dan SOP dengan terus melakukan peninjauan terhadap tiga titik reklame di Denpasar ini. Tiga titik reklame ini telah mendapatkan surat peringatan dan pemanggilan untuk dapat ditindaklanjuti segera oleh pemilik, baik melakukan pembongkaran secara bertahap. "Kami juga memberikan apresiasi kepada pemilik yang telah melakukan penurunan dan pembongkaran reklame ukuran besar sendiri. Ukuran reklame cukup besar berkisaran 10 x 6 meter sehingga pemilik membutuhkan waktu yang cukup lama menurunkan maupun membongkarnya," ujar Wiradana.

Jika tidak melakukan pembongkaran sendiri, pihaknya bersama tim yustisi yang terdiri dari TNI, Polri, akan melakukan pembongkaran yang disaksikan aparat desa/lurah serta instansi terkait. Penindakan terhadap reklame yang telah habis masa izinnya dan terkait juga zona larangan hingga menjelang akhir tahun ini, telah ratusan yang ditertibkan. Ia mengharapkan lewat surat pemanggilan dan koordinasi yang telah dilakukan, pemilik dapat menurunkan ataupun membongkar sendiri reklamenya.

Pantauan di lapangan, tampak pemilik reklame telah melakukan persiapan pembongkaran yang didampingi Satpol PP Kota Denpasar. Melihat kondisi reklame dengan sisi kiri dan kanan terdapat bangunan rumah penduduk, membutuhkan kehati-hatian dalam membongkarnya. **(kmb12)**

Bali Post/kmb

BONGKAR - ***Reklame yang telah melewati batas waktu pemasangan, kini mulai dibongkar pemiliknya.***

Edisi : Sabtu, 24 Oktober 2015

Hal : 2

Bali Post

Pascadirusak Orang Tak Dikenal

Desa Kelan Kembali Dirikan Baliho Tolak Reklamasi

Mangupura (Bali Post) –

Desa Adat Kelan bangkit melawan rencana reklamasi Teluk Benoa. Sore hari pascaperusakan baliho tolak reklamasi Teluk Benoa miliknya, mereka kembali mendirikan baliho tolak reklamasi. Masyarakat Desa Adat Kelan kembali mendirikan baliho tolak reklamasi di pertigaan Jalan By-pass Desa Adat Kelan, lokasi semula perusakan baliho-baliho mereka terjadi.

Demikian siaran pers dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Eksekutif Daerah Bali, Jumat (23/10) kemarin. Direktur Eksekutif Daerah

Walhi Bali Suriadi Darmoko dalam siaran persnya menyebutkan, sekitar pukul 17.30 Wita, Forum Pemuda Kelan bergerak untuk mendirikan baliho bertuliskan "Tolak Reklamasi Berkedok Revitalisasi Teluk Benoa", "Batalkan Perpres 51 Tahun 2014", "Lawan atau Tenggelam". Mereka bergotong royong untuk mendirikan baliho berukuran sekitar tiga kali lima meter. Pendirian baliho tolak reklamasi tersebut, menurut I Kadek Buda Warsa Dwi Sanjaya dari Forum Pemuda Kelan, merupakan bentuk konsistensi penolakan masyarakat Desa Adat Kelan atas rencana reklamasi Teluk Benoa. "Apa pun rintangannya, langkah kami tidak akan surut untuk menolak reklamasi Teluk Benoa," paparnya.

Kadek Buda meminta kepada pemerintah untuk segera membatalkan rencana reklamasi Teluk Benoa dan mencabut Perpres 51 Tahun 2014. "Desa kami akan terkena dampak negatif apabila reklamasi Teluk Benoa terus dipaksakan," ujar Kadek Buda, seperti dikutip Suriadi Darmoko. Usai mendirikan baliho, Forum Pemuda Kelan berfoto bersama di depan baliho yang telah mereka pasang itu.

Suriadi Darmoko yang juga Koordinator Divisi Politik ForBALI menjelaskan, setiap pejabat pusat datang ke Bali, perusakan baliho tolak reklamasi Teluk Benoa selalu terjadi. "Perusakan baliho tolak reklamasi Teluk Benoa terjadi sejak era kepemimpinan SBY. Perusakan baliho tolak reklamasi Teluk Benoa juga kerap dilakukan ketika ada pertemuan-pertemuan internasional yang di lakukan di Bali," papar Suriadi.

Kamis (22/10) dini hari, baliho tolak reklamasi Teluk Benoa milik Desa Adat Kelan dirusak orang tak dikenal di mana pada hari yang sama Wakil Presiden RI Jusuf Kalla membuka acara ALAWMM (*ASEAN Law Ministers Meeting*) di Nusa Dua Room, Hotel Melia Nusa Dua. "Ada pihak yang berusaha menutupi penolakan rakyat Bali terhadap reklamasi Teluk Benoa dengan merusak baliho-baliho tersebut, sehingga dalam banyak kesempatan setiap pejabat pusat datang ke Bali prakt'k itu terus berulang," paparnya.

Pemerintah pusat, menurut Suriadi, harus segera mengambil langkah strategis untuk segera menghentikan rencana reklamasi Teluk Benoa. "Rencana reklamasi sudah mendapatkan penolakan keras dari rakyat Bali dan Presiden Jokowi harus segera mencabut Perpres 51 Tahun 2014," desak Suriadi.**(kmb)**

Edisi : Sabtu, 24 Oktober 2015

Hal : 3